BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 28 November 2021, dapat disimpulkan bahwa:

- Kegiatan PKPA telah memberikan banyak wawasan dan pemahaman kepada calon apoteker dalam hal peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- Kegiatan PKPA membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Kegiatan PKPA ini telah memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Kegiatan PKPA berguna untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5. Kegiatan PKPA telah memberi gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Kimia Farma Blitar adalah sebagai berikut:

 Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri, dan pengetahuan di

- bidang farmasi dan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar, dan mudah dipahami.
- 2. Mahasiswa PSPA perlu mempelajari dan memahami peraturan perundang undangan yang terbaru terkait farmasi khususnya di bidang apotek agar dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
- Mahasiswa PSPA harus bisa lebih aktif dalam melaksanakan PKPA di apotek sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolah dan mengembangkan apotek secara optimal.
- 4. Pendokumentasian Patient Medication Record (PMR) secara lengkap dapat dilakukan agar dapat diketahui riwayat pengobatan dan perkembangan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartini, Y.S, dan Sulasmono, 2006, Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/ Menkes/ SK/ VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang daftar perubahan golongan obat No. 1.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ Menkes/ SK/ X/ 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.
- McEvoy, G.K., et al., 2011, AHFS drug information, 2011, Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists.
- Medscape, 2020, Medscape Reference, Aplikasi Medscape.
- MIMS Indonesi, 2014. MIMS Petunjuk Konsultasi ed 13, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Stockley, I, H., 2008. Stockley's Drug Interaction, Eight Edition. London: Pharmaceutical Press.
- Undang–Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.